



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/148 YEAR 2025

ABOUT
COMMITTEE IMPLEMENTATION AND TEAM DISCUSS ACTIVITY FORUM EQUIPMENT
REGIONAL FINALIZATION DOCUMENT DRAFT INITIAL PLAN
CONSTRUCTION MEDIUM-TERM REGIONAL
PROVINCE PAPUA TENGAH
YEAR 2025-2029

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. that in order to facilitate the activity of the Regional Equipment Finalization Document Draft Initial Plan Construction Medium-Term Regional Province Papua Tengah Year 2025-2029, it is necessary to form a committee of implementation and discussion team;
- b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Committee of Implementation and Discussion Team of the activity of the Regional Equipment Finalization Document Draft Initial Plan Construction Medium-Term Regional Province Papua Tengah year 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

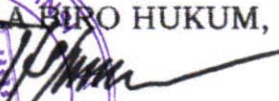
Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Forum Perangkat Daerah Finalisasi Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah Finalisasi Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Finalisasi Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/148 TAHUN 2025
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS
 KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
 FINALISASI DOKUMEN RANCANGAN AWAL
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA
 TENGAH TAHUN 2025-2029

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS

A. PANITIA PELAKSANA:

- | | | |
|---------------------------------|-------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah |
| 2. Ketua | : | Jemmi Gerson Adii, S.E. |
| 3. Wakil Ketua | : | Michael S. Zonggonauw, S.E. |
| 4. Sekretaris | : | Yelly Telenggen, S.Sos. |
| 5. Anggota | : | |
| a. Sekretariat | : | 1. Irianto, S.T;
2. Muhammad Yusuf;
3. Melinda Ristiyani, S.Si;
4. Thirsa Theo Paliling, S.Ak;
5. Hikalefiel Bonsapia;
6. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi;
7. Anance Melanesia Sapari, S.T;
8. Kemelia Yogi |
| b. Konsumsi | : | 1. Feniks Melvi Kareni, S.IP.
2. Bay Pop A. Kobogau, SE;
3. Ida Andriani Lestari, A.Md.
4. Berth Jeffray Marweri
5. Noak Nawipa, S.E.
6. Andriyatul Masruroh, S.Pd.
7. Chindy Esa Witra
8. Novalia Leontin Agapa |
| c. Perlengkapan Dekorasi | dan : | 1. Stepen HS, S.E.
2. Irianto Aduari Patora
3. Prinarto
4. Alfonsius Albertho, S.T.
5. Mozart Riliandi, S.T.
6. Fredrik Viktor Adii
7. Adam Azis, S.M.
8. Sumantri
9. Heri Bertho Zonggonauw, S.P.W.K.
10. Maison Enumbi, S.T.
11. Benwat Yogi
12. Melvin Douw
13. Klemens S. Tomas Erari, S.IP.
14. Nelson Dalot Flassy
15. Pissi Patriss Dionesius Sembor |
| 6. Pembawa Acara
Pembawa Doa | dan : | 1. Ivanda Piter, S.STP.
2. Herlin Monalisa A.D Mansawan, SH. |

B. TIM PEMBAHAS:

1. Dinas Pekerjaan Umum : a. Septian M. Pasaribu, S.STP.
dan Perumahan Rakyat b. Lorensius Patulak, S.T.
2. Dinas Tenaga Kerja, :
Transmigrasi dan Energi a. Mickael Alexander Kedepa, S.Tr.I.P.
dan Sumber Daya b. Irianto, S.T.
Mineral.
3. Dinas Lingkungan : a. Calvin Sada, S.Tr.I.P.
Hidup, Kehutanan dan b. Valentino M. Tebai, S.Tr.I.P.
Pertanahan
4. Dinas Komunikasi, : a. Kent Sroyer, S.T.
informatika, Statistik dan b. Hans Aninam
Persandian
5. Dinas Perhubungan : Justinus J. Maryen, S.T.
6. Dinas Pemadam : a. Yerry Fernando Rumbaibab
Kebakaran dan b. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana
dan SATPOL PP
7. Dinas Kesehatan, : a. Dedi Mindara, S.SIT., M.Kes
Pengendalian Penduduk b. Achmad Santoso
dan Keluarga Berencana
8. Dinas Administrasi : a. Dekta, S.Sos., M.AP
Kependudukan dan b. Pasang Tangke
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
masyarakat dan Kampung
9. Dinas Pendidikan dan : a. Marthen G. Erari, S.KM., M.Ec.Dev
Kebudayaan b. Ayu Sultari, S.Pi
10. Dinas Sosial :
Pemberdayaan Anitha Anike Jitmau, SE
Perempuan dan
Perlindungan Anak
11. Dinas Koperasi, Usaha : a. Suwignyo, S.Sos., M.H
Kecil dan Menengah, b. Edmund I. Syaranamual, SE
Perindustrian dan
Perdagangan
12. Dinas Penanaman Modal : a. Butet F. Manurung, S.P., M.M
dan PTSP b. Arnold Asmuruf, SE., M.Si
13. Dinas Kepemudaan, : Mike A Elais. Watori, SE
olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Pertanian, Pangan, : Eddy Lukman S, S.Hut., M.I.P
Kelautan dan Perikanan
15. Badan Kepegawaian dan : a. Seminus Enumbi, S.STP
Pengembangan Sumber b. Hary Anto Masarrang, S.T
Daya Manusia
16. Badan Pengelolaan : a. Alvian Nipi, S.T
Pendapatan, keuangan b. Akuila Nanthi, A.Md.Tek
dan Aset Daerah
17. Badan Perencanaan : a. Irvan R. Sapulete, S.STP
Pembangunan, Riset dan b. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.IP
Inovasi Daerah

18. Badan Kesatuan Bangsa : Zakaria Kalalembang, S.Sos
dan Politik
19. Inspektorat : a. Hendarto, S.STP;
b. Marinus Deldvian Malondong, S.T;
20. Sekretariat Daerah : Apolos I Wambrauw, S.Hut.,M.Eng
21. Sekretariat DPRD : Catur Mahendra Nugraha, S.T
22. Sekretariat MRP : Henok Madai, S.Tr.I.P

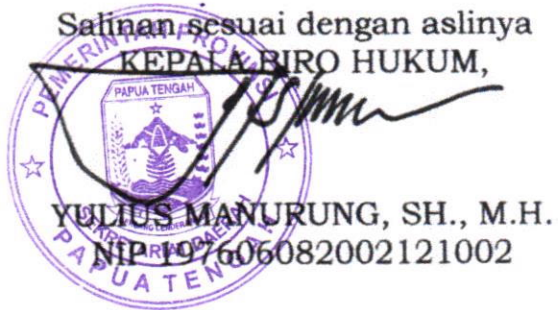
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP.197606082002121002